

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hakim merupakan tokoh sentral di dalam peradilan, secara langsung bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan harus bersikap baik serta menjalankan tugas-tugas kehakimannya dengan baik dan keputusannya dirasakan keadilannya oleh para pencari keadilan.

Putusan Pengadilan yang adil, menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan yang dikenal dengan kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian halnya profesi Hakim mempunyai Kode Etik tersendiri, bahkan Kode Etik Hakim sangat rinci tertulis dan berlaku untuk semua Hakim Peradilan.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, bahwa Pengadilan Agama sejak berdirinya ada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama maka dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dialihkan baik pembinaan teknis Peradilan, organisasi, administrasi maupun finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 5: (1)). Dengan demikian pengawasan dan pembinaan Pengadilan Agama sama dengan Pengadilan Umum lainnya yang ada di Indonesia. Segala produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung berlaku juga terhadap Pengadilan Agama.

Untuk pengawasan dan pembinaan Hakim, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan Nomor: KMA/104/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku sejak 22 Desember 2006 dengan sepuluh Prinsip yaitu:

- a. Berperilaku adil
- b. Berperilaku jujur
- c. Berperilaku arif dan bijaksana
- d. Bersikap mandiri
- e. Berintegritas tinggi
- f. Bertanggung jawab
- g. Menjunjung tinggi harga diri
- h. Berdisiplin tinggi
- i. Berperilaku rendah hati
- j. Bersikap profesional.

Usia berlakunya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) sampai dengan penulis menyusun skripsi (tahun 2015) keputusan Mahkamah Agung tersebut telah berlaku 9 tahun dan relatif lama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga hukum yang harus tunduk terhadap berlakunya keputusan Mahkamah Agung tersebut, untuk itu apakah ada dampaknya terhadap tugas dan kewenangan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang? Dari latar belakang itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemahaman Pedoman Perilaku Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Tugas dan Kewenangan Hakim Pada Pengadilan Agama Sumedang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hakim Pengadilan Agama Sumedang telah memahami dan mengerti serta melaksanakan dengan baik tentang peraturan Mahkamah Agung Nomor : KMA/104A/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim?
2. Bagaimana pengaruh peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Sumedang?
3. Bagaimana pengaruhnya pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim terhadap penyelesaian kasus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apakah Hakim Pengadilan Agama Sumedang telah mengetahui dan mengerti serta melaksanakan dengan baik tentang

peraturan Mahkamah Agung Nomor : KMA/104A/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Sumedang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam kajian Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menarik minat para peneliti untuk meneliti tentang masalah yang serupa dari sudut pandang yang berbeda, Dan dapat menjadi acuan untuk membandingkan antara hak dan kewajiban hakim selaku pejabat negara dalam bidang yudikatif.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara Hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana prikehidupan yang aman, tentram, dan tertib. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup

kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan tersebut. Bahkan ia "identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berkenaan dengan itu, dalam hal ini Hakim pengadilan Agama, yang merupakan tokoh sentral dari komponen penegakan hukum yang terlibat secara langsung dengan proses hukum akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memberikan pelayanan hukum yang seadil-adilnya kepada para pencari keadilan dan harus mematuhi terhadap Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Maka dengan adanya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) tersebut apakah menjadi beban atau menambah motivasi ke Istiqomahan Hakim dalam menegakan Hukum.

Maka penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana dan bagaimana peran yang dilakukan oleh seorang Hakim pengadilan agama dalam melaksanakan Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Hal ini penting dilakukan mengingat perannya yang sangat kompleks, yaitu menyelaraskan antara kapasitasnya sebagai penegak hukum dan selaku anggota masyarakat. Penelitian ini diupayakan mengambil dari berbagai sumber yang relevan, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang akan dibahas.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah termasuk metode Etnografi atau penelitian lapangan. Menurut Kanneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (ethnographic study atau ethnography).¹ Lawrence Neuman juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian participant observation.² Akan tetapi, menurut Neuman etnografi hanyalah merupakan perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana penelitian lapangan harus dilakukan. Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnomethodologi merupakan studi sosiologi.³ Etnografi memberikan jawaban atas pertanyaan apakah budaya suatu kelompok individu, sedangkan etnomethodologi memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang diterima secara sosial.

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana penelitian mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

¹ Kanneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc, 1982) hlm. 254

² W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods, (Qualitative and Quantitative approaches)*, Ed. 5th., (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hlm. 363

³ Roice Singleton ed.all, *Approaches to Social Research*, (New York: Oxford University Press, 1988), hlm. 308

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).⁴ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan Data Tangan Pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;
 4. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012;
- b. Sumber data sekunder adalah berupa berbagai macam tulisan dari buku-buku, modul data-data internet yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 38

⁵ Ibid, Sumardi Suryabrata.

3. Jenis Data

Jenis data diklasifikasikan sesuai dengan batas-batas rumusan masalah yaitu:

- a. Data mengenai pemahaman dan pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim pada Hakim di Pengadilan Agama Sumedang.
- b. Data yang dijadikan indikator pengaruh baik dan tidak baik untuk penerapan Pedoman Perilaku Hakim terhadap kinerja Hakim.
- c. Data tentang penunjang dan penghambat perilaku Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenang Hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

- a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan keterangan/data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan.

- b. Wawancara

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶

- c. Studi kepustakaan

⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 94

studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁷

5. Analisis data.

Pengolahan data merupakan langkah penelitian yang sangat penting agar data dapat mempunyai arti yang sebenarnya. Analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Kategorisasi dan klasifikasi data

pada tahap ini dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

b. Produksi data

Selanjutnya memproduksi data berdasarkan hasil kategorisasi diatas. Kemudian hasil produksi disesuaikan dengan observasi atau pengamatan lapangan agar diharapkan dapat lebih memberikan gambaran tentang obyek yang sedang diteliti.

c. Menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya

dari hasil produksi data tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan data-data yang lain yang diperoleh diharapkan dapat ditemukan hubungan antara satu data dengan data yang lain.

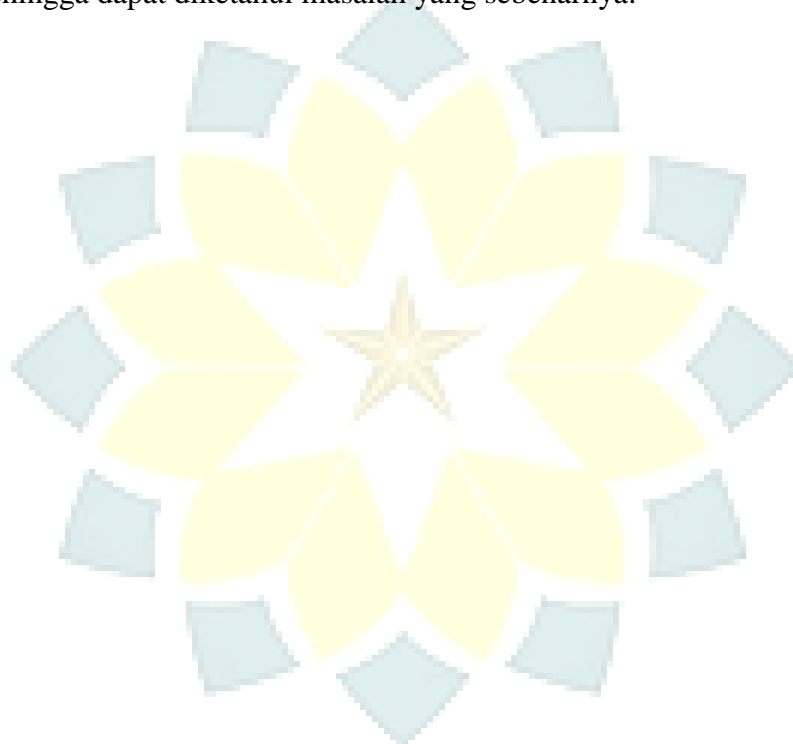
d. Verifikasi

⁷ Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 129

Setelah data-data telah terkumpul diadakan verifikasi sesuai dengan bobot permasalahan yang menjadi starting penelitian.

e. Penarikan penelitian

Setelah data-data diverifikasi selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diketahui masalah yang sebenarnya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG